

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah serta kondisi geografis yang sangat mendukung pengembangan sektor pertanian. Letak Indonesia di wilayah tropis dengan curah hujan yang relatif tinggi, ketersediaan lahan pertanian yang luas, serta keanekaragaman hayati yang tinggi menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional. Sejak lama, sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai penyedia pangan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian memiliki posisi penting dalam menjaga ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Zuhdi, 2021).

Peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja. Di berbagai daerah di Indonesia, sektor pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan utama yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama pada kelompok masyarakat berpendidikan rendah dan masyarakat perdesaan. Selain berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja, sektor pertanian juga berperan sebagai pemasok bahan baku bagi sektor industri serta penyumbang devisa melalui kegiatan ekspor komoditas pertanian. Dengan demikian, keberlanjutan sektor pertanian menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat (Fauzi, 2022).

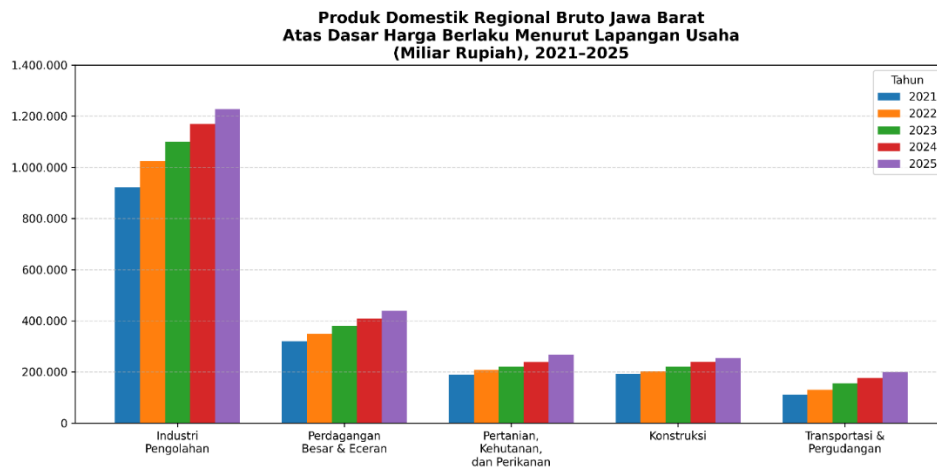
Sektor pertanian memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang cukup besar terhadap perekonomian daerah karena mampu menciptakan keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya, seperti industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan jasa (Tanjung, 2021). Peningkatan produktivitas pertanian akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor-sektor terkait sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Oleh sebab itu,

penguatan sektor pertanian tidak hanya berdampak pada petani sebagai pelaku utama, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian secara keseluruhan. Pentingnya sektor pertanian juga tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan petani. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan pertanian melalui penyediaan sarana produksi, pengembangan infrastruktur pertanian, pemberian bantuan kepada petani, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani. Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dalam mewujudkan kemandirian pangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Andriansyah, 2025).

Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Provinsi ini dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki berbagai sektor unggulan, mulai dari industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, hingga sektor pertanian. Keberadaan sektor-sektor tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu daerah dengan aktivitas ekonomi yang sangat dinamis dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2026), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 mencapai Rp3.038,67 triliun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat aktivitas ekonomi tertinggi di Indonesia. Tingginya nilai PDRB tersebut mencerminkan besarnya kontribusi berbagai sektor ekonomi dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan daerah.

Selama periode 2021–2025, struktur perekonomian Jawa Barat didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Keempat sektor tersebut secara rata-rata memberikan kontribusi sebesar 71,98 persen terhadap PDRB Jawa Barat. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu

penopang utama perekonomian daerah meskipun perkembangan sektor industri di Jawa Barat berlangsung sangat pesat.



Gambar 1.1 PDRB Provinsi Jawa Barat 2021-2025

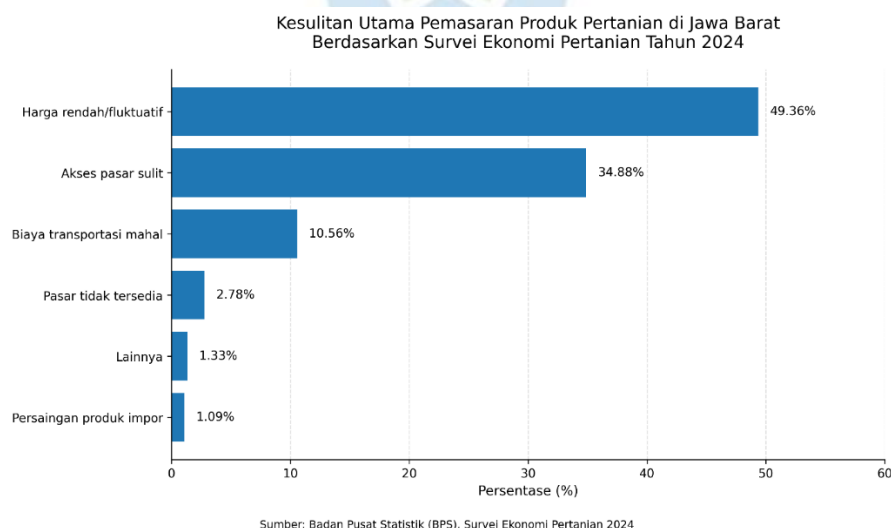
Sumber : Diolah Peneliti, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Vol 29, 2026

Di antara tujuh belas kategori lapangan usaha yang terdapat dalam struktur PDRB Jawa Barat, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menempati posisi ketiga terbesar setelah Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar serta Eceran. Pada tahun 2025, sektor ini berkontribusi sebesar 8,81 persen terhadap total PDRB Jawa Barat dengan nilai mencapai Rp267,71 triliun. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki peranan yang sangat penting dalam menopang aktivitas ekonomi daerah sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat Jawa Barat.

Kontribusi sektor pertanian yang besar terhadap perekonomian Jawa Barat menunjukkan bahwa pembangunan sektor ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan produksi, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan sistem distribusi dan pemasaran yang efektif (Fauzi, 2022). Produksi pertanian yang tinggi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila hasil pertanian sulit dipasarkan atau tidak mampu memberikan keuntungan yang layak bagi petani.

Pada kenyataannya, berbagai permasalahan masih dihadapi oleh petani dalam memasarkan hasil produksinya. Salah satu masalah utama adalah rendahnya posisi tawar petani dalam rantai pemasaran. Dalam banyak kasus, petani masih bergantung pada tengkulak atau pedagang perantara yang memiliki kendali lebih besar terhadap penentuan harga. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan petani menerima harga jual yang rendah dibandingkan dengan harga yang diterima konsumen di pasar akhir. Akibatnya, manfaat ekonomi yang diperoleh petani dari aktivitas produksi pertanian menjadi kurang optimal (Zuhdi, 2021)

Permasalahan pemasaran hasil pertanian juga menjadi tantangan serius dalam pembangunan pertanian modern. Sistem pemasaran yang tidak efisien dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan harga yang tinggi antara tingkat petani dan konsumen (Tanjung, 2021). Selain itu, keterbatasan akses informasi pasar, keterbatasan jaringan pemasaran, serta tingginya biaya distribusi turut memperburuk kondisi pemasaran hasil pertanian, terutama bagi petani skala kecil.



Gambar 1.2 Kesulitan dalam Pemasaran Produk/Hasil Pertanian di Provinsi Jawa Barat 2024

Sumber : Diolah Peneliti, BPS Hasil Survey Ekonomi Pertanian 2024.

Berdasarkan hasil Survei Ekonomi Pertanian Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat, sebanyak 49,36 persen petani mengalami permasalahan berupa harga

produk yang rendah atau berfluktuasi, sedangkan 34,88 persen petani mengalami kesulitan dalam mengakses pasar. Selain itu, sebesar 10,56 persen petani menghadapi kendala biaya transportasi yang tinggi dalam proses pemasaran hasil pertanian. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan harga dan akses pasar masih menjadi tantangan utama yang dihadapi petani di Jawa Barat dalam memasarkan hasil produksinya. Apabila permasalahan pemasaran tidak ditangani secara tepat, maka kontribusi besar sektor pertanian terhadap perekonomian daerah tidak akan sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Peningkatan kesejahteraan petani tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi atau kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan petani memperoleh akses pasar yang lebih luas serta harga jual yang lebih menguntungkan (Andriansyah, 2025). Oleh karena itu, aspek pemasaran menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Menyadari berbagai permasalahan yang dihadapi petani, khususnya dalam aspek pemasaran hasil pertanian, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani. Upaya tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa petani merupakan aktor utama dalam pembangunan pertanian yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan, meningkatkan perekonomian daerah, serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya petani masih sering menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya posisi tawar dalam rantai pemasaran, ketidakstabilan harga komoditas pertanian, keterbatasan akses pasar, hingga tingginya ketergantungan terhadap perantara atau tengkulak. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi pendapatan petani dan menghambat terwujudnya kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap petani, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kapasitas,

kemandirian, dan kesejahteraan petani. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada petani dari berbagai risiko usaha pertanian, termasuk memberikan kemudahan akses terhadap sarana produksi, pembiayaan, informasi, teknologi, serta pemasaran hasil pertanian. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem pertanian yang lebih berkeadilan dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi petani untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil usahanya.

Komitmen tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Peraturan daerah ini menjadi instrumen kebijakan yang secara khusus mengatur berbagai upaya perlindungan dan pemberdayaan petani di wilayah Jawa Barat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Salah satu aspek penting yang mendapat perhatian dalam peraturan tersebut adalah penguatan sistem pemasaran hasil pertanian guna meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas akses pasar bagi petani. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga berupaya memperbaiki aspek hilir yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran hasil pertanian.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat arah kebijakan tersebut melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023–2026. Peraturan ini menjadi pedoman operasional bagi perangkat daerah khususnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat dalam melaksanakan berbagai program yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan petani. Salah satu fokus yang dikembangkan adalah peningkatan akses pemasaran hasil pertanian melalui berbagai kegiatan yang mampu mempertemukan petani dengan konsumen secara lebih efektif. Dengan adanya rencana aksi tersebut, diharapkan tercipta sistem pemasaran yang lebih efisien, mampu memotong rantai distribusi yang panjang, meningkatkan posisi tawar

petani, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani di Provinsi Jawa Barat.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Program Pasar Tani sebagai salah satu instrumen implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani. Program ini dirancang untuk memperluas akses pemasaran hasil pertanian sekaligus menjadi wadah interaksi langsung antara petani dan konsumen. Melalui Program Gelar Produk Pasar Tani, petani diharapkan dapat menjual hasil pertaniannya dengan harga yang lebih kompetitif tanpa harus melalui banyak perantara, sementara masyarakat memperoleh akses terhadap produk pertanian yang segar, berkualitas, dan terjangkau. Oleh karena itu, Program Pasar Tani tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemasaran, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mewujudkan sistem pemasaran pertanian yang lebih adil, efisien, dan berpihak kepada petani.



Gambar 1.3 Dokumentasi Program Gelar Produk Pasar Tani oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat

Sumber : Distanhorti Jabar, 2026

Program Gelar Produk Pasar Tani telah diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2007 sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pemasaran hasil pertanian.

Pada tahap awal pelaksanaannya, kegiatan ini masih dilaksanakan dalam bentuk yang sederhana dan belum didukung oleh regulasi daerah yang secara khusus mengatur perlindungan serta pemberdayaan petani. Penyelenggaraan Pasar Tani pada masa tersebut lebih berfokus pada penyediaan ruang bagi petani untuk memasarkan hasil panennya secara langsung kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap penguatan program ini semakin meningkat, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kehadiran regulasi tersebut menjadi landasan yang memperkuat pelaksanaan berbagai program pemberdayaan petani, termasuk Program Gelar Produk Pasar Tani, melalui pengembangan strategi pemasaran yang lebih terarah, peningkatan akses pasar, serta upaya mendorong peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, keberadaan regulasi merupakan instrumen penting yang menentukan arah pelaksanaan suatu program. Kebijakan yang memiliki dasar hukum yang jelas akan memberikan legitimasi, kepastian, dan dukungan sumber daya yang lebih kuat bagi organisasi pelaksana. Oleh karena itu, keberadaan Perda Nomor 4 Tahun 2018 dapat dipandang sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat berbagai program pemberdayaan petani agar dapat dilaksanakan secara lebih sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Program Gelar Produk Pasar Tani pada dasarnya merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk memperpendek rantai distribusi pemasaran hasil pertanian dengan mempertemukan petani dan konsumen secara langsung. Pasar Tani merupakan wadah yang dibentuk untuk mendorong kemandirian petani dalam memasarkan hasil produksinya tanpa bergantung sepenuhnya kepada perantara (Puspitasari & Nasrullah, 2023). Melalui mekanisme tersebut, petani memperoleh kesempatan untuk menjual produknya secara langsung kepada konsumen sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk sekaligus memperkuat posisi tawar petani dalam sistem pemasaran pertanian.

Pelaksanaan Program Pasar Tani di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada umumnya masih dilakukan secara insidental, yaitu hanya pada saat terdapat kegiatan tertentu seperti bazar, festival, pameran, maupun agenda promosi lainnya. Kondisi tersebut berbeda dengan pelaksanaan Program Pasar Tani oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan, meskipun jadwal pelaksanaannya masih bersifat tentatif dan dapat berubah menyesuaikan kondisi maupun kebutuhan. Pelaksanaan yang masih bersifat insidental di tingkat kabupaten/kota menyebabkan kegiatan Pasar Tani belum mampu menciptakan akses pemasaran yang berkelanjutan bagi petani. Akibatnya, manfaat yang dirasakan petani cenderung bersifat sementara karena kesempatan untuk memasarkan hasil pertanian secara langsung kepada konsumen belum tersedia secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan pelaksanaan Program Pasar Tani masih menjadi tantangan dalam upaya memperkuat sistem pemasaran hasil pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.

Permasalahan keberlanjutan akses pasar merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan pertanian. Keberhasilan pemasaran hasil pertanian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan petani menghasilkan produk, tetapi juga oleh kemampuan kelompok tani dan kelembagaan pertanian dalam membangun akses pasar yang berkelanjutan (Untari, 2024). Ketersediaan pasar yang dapat diakses secara rutin sangat penting untuk memberikan kepastian bagi petani dalam menyalurkan hasil produksi serta merencanakan usaha tani secara lebih efektif. Pelaksanaan Pasar Tani oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat juga masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan lokasi, karena kegiatan umumnya memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara gratis sehingga bergantung pada ketersediaan tempat dan sulit dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung juga terlihat dari tingkat kelayakan sarana yang digunakan, seperti kondisi tenda yang telah mengalami kerusakan.

Dalam konteks implementasi program publik, keterbatasan fasilitas merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan yang diberikan kepada kelompok sasaran. Transformasi sistem pemasaran pertanian saat ini menuntut petani untuk memiliki akses yang lebih luas terhadap pasar. Perubahan sistem pemasaran pertanian mengharuskan petani tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan pasar melalui penguatan kelembagaan dan kerja sama kolektif (Ibnu, 2023). Tanpa adanya dukungan sistem pemasaran yang memadai, petani kecil akan mengalami kesulitan dalam bersaing dan meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, keberadaan program yang mampu menghubungkan petani dengan konsumen secara langsung menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika pemasaran pertanian saat ini. Berbeda dengan pelaksanaan Pasar Tani di berbagai daerah yang umumnya bersifat insidental, Distanhorti Jawa Barat berupaya menjaga keberlangsungan program melalui penyelenggaraan kegiatan secara berkala meskipun pelaksanaannya masih bersifat tentatif.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pelaksanaan Program Gelar Produk Pasar Tani 2024-2025 oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat

Tahun	Jumlah Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Petani & UMKM
2024	24 Kegiatan	- Halaman Kantor Distanhorti	- 34
		- Bale Asri PUSDAI Jawa Barat	- 30
		- Area Parkir Barat Stadion Arcamanik, Dispora Jabar	- 27
		- Lap.Kologdam TNI-AD Jl.Aceh	- 25
			- 28
			- 16
			- 25
			- 16
			- 11
			- 24
			- 11
			- 25
			- 28
			- 16
			- 19
			- 24
			- 27
			- 25
			- 16

Tahun	Jumlah Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Petani & UMKM
			- 11 - 26 - 18 - 16 - 25
2025	13 Kegiatan	- Halaman Kantor Distanhorti Jabar - Halaman SDN 245 Sumber Sari Indah, Babakan Ciparay Kota Bandung - Halaman Kantor Dinas Pendidikan Prov.Jabar - Lap.Kologdam TNI-AD Jl.Aceh	- 20 - 14 - 17 - 27 - 39 - 29 - 18 - 26 - 25 - 25 - 25 - 29 - 28

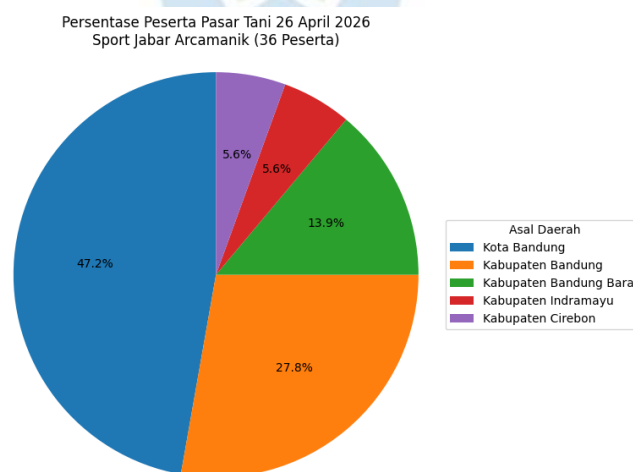
Sumber : Distanhorti Jawa Barat, Diolah Peneliti, 2026

Pelaksanaan Program Gelar Produk Pasar Tani yang diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat pada dasarnya dirancang sebagai wadah pemasaran yang mampu mengakomodasi partisipasi petani dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Melalui program ini, petani diberikan kesempatan untuk mempromosikan dan memasarkan berbagai hasil pertanian unggulan maupun komoditas khas daerah secara langsung kepada konsumen. Selain bertujuan memperluas akses pasar, program ini juga diharapkan mampu menjadi sarana penguatan jejaring pemasaran antarpetani serta meningkatkan eksistensi produk pertanian lokal di tingkat regional. Dengan cakupan wilayah yang melibatkan 27 kabupaten/kota, Program Pasar Tani seharusnya dapat menjadi representasi keberagaman potensi pertanian Jawa Barat sekaligus mendukung pemerataan kesempatan pemasaran bagi seluruh petani yang menjadi sasaran program.

Berbeda dengan kondisi yang diharapkan, data awal penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pasar Tani masih memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan program dengan kondisi aktual di lapangan. Partisipasi petani dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih tergolong rendah dan belum mencerminkan keterlibatan wilayah secara

merata. Pada setiap pelaksanaan kegiatan, peserta yang berpartisipasi cenderung didominasi oleh petani yang berasal dari wilayah yang berdekatan dengan lokasi penyelenggaraan Pasar Tani, sedangkan keterlibatan petani dari daerah yang memiliki jarak lebih jauh masih relatif terbatas.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa jangkauan pelaksanaan program dan aksesibilitas bagi petani belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kelompok sasaran yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Akibatnya, kesempatan petani untuk memanfaatkan Program Pasar Tani sebagai media pemasaran hasil pertanian belum dapat dirasakan secara merata. Apabila kondisi ini terus berlangsung, tujuan Program Pasar Tani sebagai sarana pemasaran yang inklusif, mampu memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh wilayah Jawa Barat berpotensi belum tercapai secara optimal. Sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi petani serta kendala yang dihadapi dalam implementasi Program Pasar Tani.

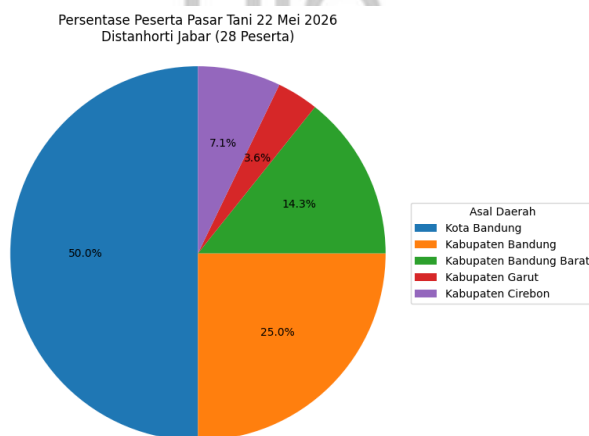


**Gambar 1.4 Peserta Pasar Tani 26 April 2026 oleh
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat**
Sumber : Diolah Peneliti, Distanhorti Jabar, 2026

Persentase Jumlah Peserta Peserta Pasar Tani tanggal 26 April 2026 yang diselenggarakan di Sport Jabar Arcamanik, terlihat bahwa jumlah peserta yang

mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 36 peserta yang berasal dari lima daerah di Provinsi Jawa Barat. Komposisi peserta menunjukkan bahwa Kota Bandung mendominasi kegiatan dengan jumlah 17 peserta atau sebesar 47,2 persen dari total peserta. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Bandung dengan jumlah 10 peserta atau sebesar 27,8 persen, diikuti oleh Kabupaten Bandung Barat sebanyak 5 peserta atau sebesar 13,9 persen. Sementara itu, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon masing-masing hanya mengirimkan 2 peserta atau sebesar 5,6 persen dari total peserta yang berpartisipasi.

Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi peserta dalam kegiatan Pasar Tani masih didominasi oleh petani yang berasal dari wilayah yang berdekatan dengan lokasi penyelenggaraan kegiatan. Secara kumulatif, peserta yang berasal dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat mencapai 88,9 persen dari total peserta. Sebaliknya, keterlibatan petani dari daerah yang memiliki jarak lebih jauh dari lokasi kegiatan, seperti Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon, masih relatif rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jangkauan Program Pasar Tani belum mampu mengakomodasi partisipasi petani secara merata dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat.



**Gambar 1.5 Peserta Pasar Tani 22 Mei 2026 oleh
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat**

Sumber : Diolah Peneliti, Distanhorti Jabar, 2026

Begitu juga dengan Peserta Pasar Tani pada tanggal 22 Mei 2026 yang diselenggarakan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, tercatat sebanyak 28 peserta yang berasal dari lima daerah di Provinsi Jawa Barat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kota Bandung menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak, yaitu sebanyak 14 peserta atau 50,0 persen dari total peserta. Selanjutnya, Kabupaten Bandung menyumbang 7 peserta atau sebesar 25,0 persen, diikuti Kabupaten Bandung Barat sebanyak 4 peserta atau sebesar 14,3 persen. Adapun Kabupaten Cirebon berpartisipasi dengan 2 peserta atau sebesar 7,1 persen, sedangkan Kabupaten Garut hanya mengirimkan 1 peserta atau sebesar 3,6 persen dari total peserta yang mengikuti kegiatan Pasar Tani.

Berdasarkan berbagai fenomena yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Pasar Tani di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat masih menghadapi sejumlah kendala yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan program secara optimal. Meskipun Program Pasar Tani dirancang sebagai sarana pemasaran yang dapat mengakomodasi petani dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, kenyataannya tingkat partisipasi petani dari berbagai daerah masih relatif rendah dan cenderung didominasi oleh peserta yang berasal dari wilayah terdekat dengan lokasi pelaksanaan kegiatan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang masih bersifat tentatif dan bergantung pada ketersediaan lokasi tertentu menyebabkan kontinuitas program belum sepenuhnya terjamin. Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas pelaksanaan kegiatan serta dukungan transportasi bagi peserta dari daerah yang jauh, turut menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Program Pasar Tani. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program yang diharapkan mampu memperluas akses pemasaran hasil pertanian secara merata dengan realitas implementasi yang masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana implementasi Program Pasar Tani dilaksanakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala

dalam pelaksanaannya menggunakan Model Implementasi Kebijakan Edward III dalam Agustino (2026). Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Gelar Produk Pasar Tani Dalam Pemasaran Hasil Pertanian di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena empiris yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan utama pada implementasi program gelar produk pasar tani dalam pemasaran hasil pertanian di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program yang tidak menentu mengakibatkan daya beli masyarakat dalam membeli hasil pertanian disetiap pelaksanaan kegiatan menjadi fluktuatif/tidak menentu. Hal ini menyebabkan petani dan pelaku usaha tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan.
2. Rendahnya tingkat partisipasi daerah terlihat dari masih sedikitnya kabupaten/kota yang turut serta dalam program gelar produk pasar tani. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara optimal, sehingga keterlibatan pemerintah daerah maupun pelaku usaha tani dalam kegiatan tersebut masih terbatas. Kurangnya partisipasi ini juga dapat memengaruhi keberagaman produk yang dipasarkan serta mengurangi efektivitas program dalam memperluas akses pemasaran hasil pertanian.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan gelar produk pasar tani, baik dari segi ketersediaan tempat, fasilitas pendukung, maupun transportasi. Lokasi pelaksanaan yang terbatas dan fasilitas yang belum memadai dapat mengurangi kenyamanan peserta maupun pengunjung. Selain itu, kendala transportasi turut mempersulit proses distribusi hasil pertanian dari daerah menuju lokasi kegiatan,

sehingga berdampak pada kelancaran pelaksanaan program secara keseluruhan.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses komunikasi (transmisi, kejelasan, dan konsistensi) informasi terkait program gelar produk pasar tani yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kepada para pelaksana lapangan, kelompok tani, UMKM, dan Masyarakat?
2. Bagaimana ketersediaan sumber daya (baik sumber daya manusia/aparatur, informasi, kewenangan, maupun fasilitas pendukung) yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menunjang implementasi program gelar produk pasar tani dalam pemasaran hasil pertanian?
3. Bagaimana disposisi (efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif) para aparatur pelaksana di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap instruksi dan tujuan dari gelar produk pasar tani dalam pemasaran hasil pertanian?
4. Bagaimana struktur birokrasi, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tanggung jawab (Fragmentasi), di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat memengaruhi implementasi program gelar produk pasar tani dalam pemasaran hasil pertanian?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Mengetahui proses komunikasi (transmisi, kejelasan, dan konsistensi) informasi terkait program gelar produk pasar tani yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kepada para pelaksana lapangan, kelompok tani, UMKM, dan Masyarakat.

2. Mengetahui ketersediaan dan optimalisasi sumber daya (baik sumber daya manusia/aparatur, informasi, kewenangan, maupun fasilitas pendukung) yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menunjang implementasi program gelar produk pasar tani dalam pemasaran hasil pertanian.
3. Mengetahui disposisi (efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif) para aparatur pelaksana di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap instruksi dan tujuan dari gelar produk pasar tani dalam pemasaran hasil pertanian.
4. Mengetahui struktur birokrasi, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tanggung jawab, di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat memengaruhi implementasi program gelar produk pasar tani dalam pemasaran hasil pertanian.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini tidak hanya berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di ranah Administrasi Publik, khususnya pada kajian implementasi kebijakan publik. Tetapi juga memberikan masukan terhadap birokrasi pemerintah, serta peneliti lain yang memiliki kepentingan pada isu pertanian.

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Administrasi Publik, terutama pada kajian implementasi kebijakan publik. Melalui penerapan model implementasi kebijakan dalam konteks kebijakan pasar tani di tingkat provinsi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur terkait efektivitas implementasi kebijakan di sektor pemasaran hasil pertanian. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam memahami keterkaitan antara model

implementasi dengan praktik kebijakan daerah yang berorientasi pada pembangunan ekologis dan kemandirian pangan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pemahaman mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan publik dalam bidang pemasaran hasil pertanian. Melalui proses penelitian ini, peneliti memperoleh pengalaman empiris dalam menerapkan model implementasi kebijakan ke dalam konteks nyata di lapangan. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk mengasah kemampuan analisis kritis, berpikir sistematis, serta mengembangkan keterampilan penelitian kualitatif yang relevan dengan profesi sebagai calon administrator publik.

b. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini bermanfaat khususnya untuk Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dapat dijadikan sebagai referensi akademik dan bahan ajar tambahan dalam mata kuliah kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan analisis administrasi pemerintahan daerah. Penelitian ini juga memperkaya koleksi karya ilmiah universitas, serta dapat menjadi contoh penelitian berbasis kebijakan daerah yang berorientasi pada pemasaran hasil pertanian dan pembangunan ekonomi masyarakat.

c. Bagi Instansi Pemerintah

Bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat (Distanhorti Jabar), penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi program pasar tani. Rekomendasi hasil penelitian dapat membantu instansi dalam memperbaiki aspek komunikasi kebijakan, optimalisasi sumber daya, peningkatan kapasitas pelaksana, serta penyederhanaan

struktur birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan petani dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi langsung terhadap penguatan tata kelola kebijakan publik di sektor pertanian daerah.

d. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, terutama kalangan petani dan pelaku usaha (UMKM), penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya praktik pemasaran hasil pertanian. Melalui temuan penelitian, masyarakat dapat memahami manfaat pasar tani tidak hanya dari sisi ekonomis, tetapi juga dari sisi kualitas hasil pertanian. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program pasar tani yang digagas oleh pemerintah daerah, sehingga terwujud kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem pemasaran hasil pertanian di Jawa Barat.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Program Gelar Produk Pasar Tani di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat yang ditemukan peneliti selama proses observasi awal dan studi pendahuluan. Berbagai fenomena permasalahan yang ditemukan di lapangan tersebut kemudian dijadikan sebagai titik tolak atau input utama dalam kerangka berpikir penelitian ini. Permasalahan-permasalahan yang ada tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya pengkajian yang mendalam, mengingat Program Gelar Produk Pasar Tani merupakan salah satu program strategis pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendekatkan hasil pertanian kepada masyarakat serta menstabilkan harga komoditas pangan di tingkat konsumen. Oleh karena itu, seluruh permasalahan yang teridentifikasi akan dianalisis secara sistematis dan komprehensif guna menemukan akar

persoalan sekaligus merumuskan rekomendasi solusi yang tepat bagi perbaikan implementasi program ke depannya.

Terdapat tiga permasalahan utama yang teridentifikasi sebagai input dalam penelitian ini, yang masing-masing memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan program. Pertama, pelaksanaan kegiatan yang bersifat tentatif atau tidak memiliki jadwal yang pasti dan terstruktur mengakibatkan daya beli masyarakat yang tidak menentu pada setiap pelaksanaannya, karena masyarakat tidak dapat merencanakan partisipasi mereka secara optimal akibat ketidakpastian waktu penyelenggaraan tersebut. Kedua, rendahnya tingkat partisipasi dari kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, di mana hanya sebagian kecil wilayah kabupaten/kota yang secara aktif mengikuti kegiatan Gelar Pasar Tani yang diselenggarakan oleh Distahorti Jawa Barat, sehingga jangkauan program menjadi sangat terbatas dan tidak merata di seluruh wilayah provinsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga oleh kualitas implementasi program di lapangan (Onurlubas, 2021) Ketiga, adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang cukup krusial, khususnya keterbatasan jumlah tenda dan meja yang tersedia untuk menampung seluruh peserta, serta kendala transportasi dalam pengiriman produk pertanian dari daerah asal menuju lokasi pelaksanaan Gelar Pasar Tani yang turut menghambat kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program secara keseluruhan.

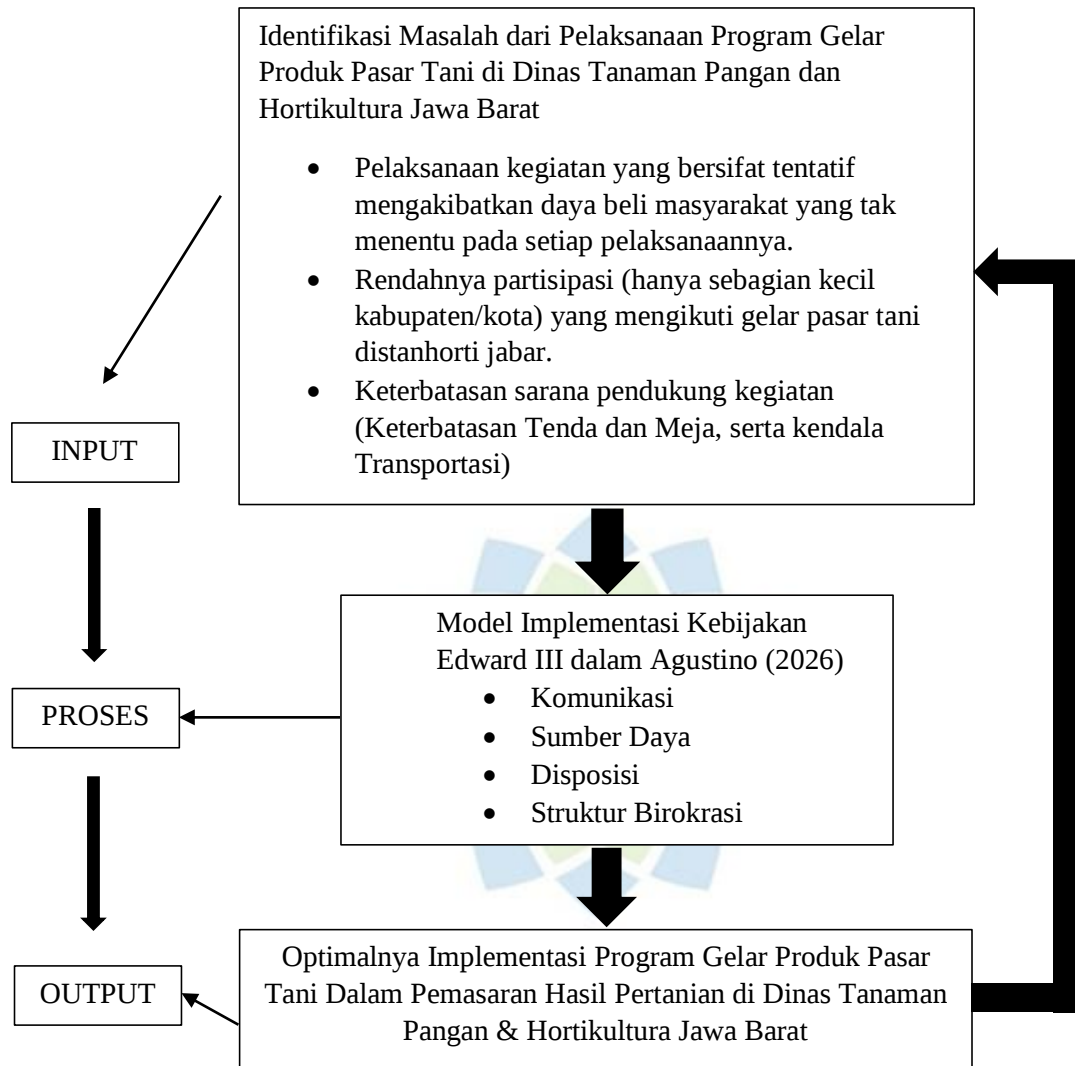
Untuk menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut secara ilmiah dan terstruktur, penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan sebagai kerangka proses analisis yang menjadi inti dari penelitian ini. Penggunaan model implementasi kebijakan dipandang sangat relevan mengingat Program Gelar Produk Pasar Tani merupakan sebuah kebijakan publik yang lahir dari mandat pemerintah daerah dan dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai aktor, sumber daya, serta mekanisme birokrasi yang kompleks. Model yang dipilih dalam penelitian ini adalah Model Implementasi Kebijakan menurut

Edward III dalam Agustino (2026), yang secara akademis telah diakui sebagai salah satu model implementasi kebijakan paling komprehensif dan banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Pemilihan model ini didasarkan pada pertimbangan bahwa model Edward III mampu menjelaskan secara menyeluruh berbagai dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program pemerintah, mulai dari aspek komunikasi antar aktor, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, hingga struktur organisasi yang menjalankan kebijakan tersebut.

Model Implementasi Kebijakan Edward III dalam Agustino (2026) mencakup empat dimensi utama yang menjadi tolok ukur analisis dalam penelitian ini, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dimensi komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai program ini disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat, baik internal dinas maupun kepada peserta dan masyarakat luas, sehingga terjadi pemahaman yang seragam dan konsisten terhadap tujuan serta mekanisme pelaksanaan program. Dimensi sumber daya menyangkut ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia, informasi, wewenang, serta fasilitas yang diperlukan dalam menjalankan program secara optimal. Dimensi disposisi mengacu pada sikap, pengaturan birokrasi, dan insentif yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Dimensi struktur birokrasi berkaitan dengan kejelasan prosedur operasional standar (*Standard Operating Procedure/SOP*) dan pembagian kewenangan antar unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan program. Keempat variabel tersebut akan digunakan secara integratif untuk mengkaji sejauh mana Program Gelar Produk Pasar Tani telah berjalan secara optimal, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendukung dalam proses implementasinya di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat.

Melalui proses analisis yang mendalam menggunakan keempat variabel model Edward III dalam Agustino (2026) tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan output yang bermakna bagi pengembangan program, yaitu tercapainya implementasi Program Gelar Produk Pasar Tani yang optimal dalam pemasaran hasil pertanian di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat. Optimalnya implementasi program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas, baik bagi petani sebagai produsen yang memperoleh akses pasar lebih baik, bagi masyarakat konsumen yang mendapatkan produk pertanian segar dengan harga yang terjangkau, maupun bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara berkelanjutan.





Gambar 1.6 Kerangka Berpikir

Sumber : Diolah Peneliti, 2026